

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan Teknologi informasi di Kabupaten Bandung saat ini mengalami banyak perubahan yang sangat pesat sebagai dampak dari globalisasi sangat marak yang selalu diperbincangkan dan telah menjadi proses nyata terutama dalam bidang teknologi yang saat ini merupakan proses pembangunan di Kabupaten Bandung untuk membangun organisasi pemerintahan dan meningkatkan efisiensi. Serta menjadi alat inovasi untuk memecahkan masalah yang ada.

Lahirnya era digital saat ini memang benar memberikan solusi yang sangat strategis dan dengan itu dapat terciptanya *Good Governance*, *Good Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan yang dibangun oleh pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya. *Governance* sendiri mencakup 3 (tiga) sektor yaitu state (Negara/Pemerintahan), private sector pariwisata (Sektor swasta/Dunia Usaha), dan society (masyarakat).

Perkembangan *good governance* di Indonesia di dorong oleh adanya dinamika yang menuntut perubahan, baik di lingkungan pemerintah, dunia usaha swasta maupun masyarakat. *Good Governance* menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) jika di interpretasikan, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun, konseus, kesetaraan, efektif, bertanggung jawab serta visi strategik.

Kebijakan ialah suatu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan suatu pedoman, pegangan, atau petunjuk, bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah, sehingga tercapainya kelancaran dan keterpaduannya dalam mencapai tujuan.

Konsep Birokrasi yang lahir dari era digital ini di kenal dengan *E-Government*. Salah satu tujuan implementasi *E-Government* tak lain adalah agar lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang prima sehingga konsep good governance dapat diwujudkan secara optimal. Maka dari pada itu kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi. Pemanfaatan *E-Government* bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan prima. Tentu kesiapan sumber daya manusia, regulasi, anggaran dana, sarana dan prasarana adalah hal mutlak yang harus disiapkan pula dalam proses penyelenggaraannya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Barang Pokok dan Barang Penting Ketentuan pada pasal 13 sebagai berikut :

1. Untuk mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, secara sendiri atau bersama-sama, Menteri dan menteri/ kepala lembaga pemerintah nonkementerian dapat membuat kebijakan dan pengendalian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap seluruh dan/atau beberapa Barang

Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 6.

2. Kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dibuat berdasarkan keputusan rapat koordinasi yang dipimpin oleh menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, yang dihadiri
3. menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian.
4. Kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.
5. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit 1 (satu) menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
6. Keputusan rapat koordinasi kebijakan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dituangkan dalam risalah atau notulensi rapat koordinasi.
7. Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat berkoordinasi dengan menteri koordinator lainnya.

8. Penyelenggaraan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilaksanakan secara elektronik menggunakan multimedia (video conference atau teleconference).

*E-Government* secara nasional yang telah berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional. Penataan sistem manajemen dan suatu proses kerja yang ada di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan memaksimalkan eksploitasi teknologi informasi. Selain itu juga *E-Government* bertujuan untuk menunjang pemerintahan yang baik dan juga bisa meningkatkan mutu pelayanan yang baik untuk kedepan.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menyebutkan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Agar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan tersebut sangat memiliki manfaat dan memiliki dampak panjang bagi masyarakat luas, Penerapan pemerintah dalam pembangunan itu sendiri mengutamakan suatu upaya dari keberlanjutannya dan kelangsungan. Maka dari pada itu perubahan -perubahan mulai tercipta.

Konsep Pengelolaan Informasi Komoditas pasar diterapkan untuk membantu masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah secara efektif dan efisien. Pembentukan teknologi pengelolaan informasi komoditas harga pasar dengan tepat guna melalui suatu program maupun diadakannya aplikasi harus dapat mengatasi persoalan pengelolaan informasi komoditas harga pasar yang terjadi di masing-masing wilayah Kota maupun Kabupaten yang ada di Indonesia.

Pemanfaatan teknologi pengelolaan informasi komoditas harga pasar diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan investasi di Indonesia dalam hal ini pemerintah dapat melakukan pengaturan dan juga pengawasan terhadap informasi pasar dan perdagangan investasi di Indonesia, dan juga untuk mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat bagi masyarakat setempat.

Munculnya permasalahan yang ada di Kabupaten Bandung saat ini tentang penerapan informasi komoditas harga pasar sangatlah kurang perhatian khususnya dari pelayanan pemerintah hari demi hari harga pasar yang kadang naik turun dan juga menyumbang perekonomian yang ada di Indonesia maka dari pada itu diperlukannya sebuah inovasi baru dengan adanya aplikasi pengelolaan informasi harga pasar masyarakat merasa terbantu baik dari masyarakat kecil hingga menengah mereka bisa mengakses dengan mudah.

Untuk mendukung kegiatan pengelolaan informasi harga pasar Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum melakukan dalam unsur pelaku usaha setiap orang perorangan atau badan usaha ,baik yang berbentuk badan hukum maupun badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum suatu Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui suatu perjanjian dalam kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Unsur pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha pasar yang bersangkutan sama Unsur harga pasar biaya yang harus dibayar dalam suatu transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara para pihak pasar bersangkutan.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Informasi Komoditas Harga Pasar diharapkan membantu masyarakat untuk mengetahui naik dan turun harga barang pokok dan barang penting yang ada di pasar pasar di setiap harinya, Masalah informasi harga pasar merupakan masalah yang kompleks, Kompleks itu misalnya dari sisi manajemen berarti perlu dilakukan perencanaan Tempat pengelolaan komoditas harga pasar dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recyle*), Pelaksanaan, mentoring dan evaluasi.

Permasalahan Harga Pasar yang ada di Kabupaten Bandung, Upaya Pemerintah tidak pernah berhenti untuk mengupayakan agar masyarakat lebih sejahtera dari tingkat provinsi , Kota dan Kabupaten untuk mengatasi gejolak harga pasar yang dratis mengalami kenaikan harga terus berlanjut. Sejumlah harga di kabupaten bandung mengalami naik turun jumlah rata-rata harga pasar di tahun 2018-2022.

Kebijakan Gerakan “Sibapokting” merupakan keunggulan di Kabupaten Bandung dalam menaungi masalah naik dan turunnya harga bahan pokok dan barang penting yang sering menjadi suatu masalah utama yang ada di masyarakat. Melalui Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan dan Peindustrian pasal 76-79 Nomor 10 tahun 2022 Berlakunya Kebijakan Aplikasi Sibapokting dalam Pasal 76 melalui pengembangan peningkatan, penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan riset dan teknologi industri untuk meningkatkan efisiensi, Produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri dan pada pasal 77 lembaga dalam mengembangkan dalam negeri dan/atau perusahaan industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang industri, pada pasal 78 menyebutkan pemberian pembiayaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada pasal 79 pemerintah daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi industri daerah yang tekoneksi dengan sistem informasi industri nasional dalam perkembangan teknologi pada kawasan industri.

Pada Aplikasi Sibapokting dalam mempermudah masyarakat di kabupaten bandung dalam mengakses informasi 9 barang pokok seperti Beras dan Singkong ,Gula Pasir, Minyak Goreng dan Margarin, Daging Sapi dan Daging Ayam, Telur Ayam, Susu, Jagung dan Sagu, Minyak Tanah dan Gas, Garam Beryodium, yang ada di-pasar Kabupaten Bandung dan Barang Penting antara lain seperti Benih, Pupuk, Gas Elpiji, Triplek, Semen, Besi Baja Konstruksi Baja Ringan yang ada di Kabupaten Bandung.

Berikut adalah Gambar 1.1 berupa 9 Barang Pokok dan 5 Barang Penting di Kabupaten Bandung

**Gambar 1.1**  
**9 Barang Pokok dan Barang Penting**



(Sumber : <https://www.pngdownload.id/>)

Pemerintahan Kabupaten Bandung mengeluarkan suatu kebijakan terkait dengan aplikasi. Aplikasi Sibapokting Mobile merupakan sebuah sistem yang dibentuk dan menyajikan informasi data harga barang pokok dan barang penting secara *update*. Aplikasi Sibapokting ini dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memudahkan masyarakat mengakses kenaikan dan penurunan harga barang pokok dan barang penting.

Masyarakat cukup mengaksesnya melalui telepon genggam yang dapat diunduh di *Google Play Store*. Program ini juga tersedia dalam bentuk website monitoring, *Mini Core*, *Smart Card*, dengan adanya Sibapokting memudahkan masyarakat mengetahui Pembaharuan naik dan turun harga kebutuhan barang

pokok dan barang penting lainnya yang ada wilayah rumah maupun sedang berada di tempat bekerja.

Aplikasi Sibapokting memiliki desain yang trendi tampilan yang cukup menarik yang di padukan warna hijau yang di kombinasikan pula dengan warna biru dan kuning dan terdapat sebuah rangkaian daun yang berkombinasi kuning dan hijau mengartikan kesejukan yang membuat masyarakat ataupun pengguna aplikasi ini sangat nyaman dan mudah dipahami dalam mengakses aplikasi ini.

Berikut adalah Gambar 1.2 adalah Tampilan Aplikasi Sibapokting dalam mengelola Harga Barang Pokok dan Barang Penting di Pasar Kabupaten Bandung.

**Gambar 1.2**  
**Aplikasi Sibapokting**



(Sumber: Aplikasi Sibapokting tahun 2023)

Berdasarkan Gambar 1.2 Sibapokting hanya dapat di unduh di *Play Store* pada *android* dan dalam proses mengunduh aplikasi tersebut pengguna bisa mengakses harga barang pokok dan harga barang penting, Upaya yang dilakukan

oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat melaksanakan peraturan tersebut melalui memberikan pelayanan yang merata terhadap masyarakat di Kabupaten Bandung dengan aplikasi sibapokting pemerintah dapat mewujudkan pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung yang memenuhi tantangan.

*E-government (e-gov)* dalam proses eksploitasi teknologi sebagai suatu alat yang di pergunakan untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien khususnya di dalam pengelolaan informasi komoditas harga barang pokok dan barang penting, maka dari pada itu, ada dua hal penting dalam pengertian *E-Government* yang pertama penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu, kedua adalah tujuan pemanfaatnya sehingga pemerintah dapat berjalan lebih efisien, meskipun demikian *E-Government* bukan lah suatu pengganti pemerintah dalam menjalin hubungan dengan masyarakat.

Implementasi Kebijakan *E-Government* di Kabupaten Bandung sebagai penelitian dan pengembangan pengelolaan harga barang pokok dan barang penting melalui aplikasi sibapokting memiliki suatu manfaat di era informasi yang berkembang, Hal ini tidak berjalan efektif dikarenakan observasi awal yang peneliti lakukan terhadap aplikasi Sibapokting Mobile, ditemukan beberapa permasalahan penelitian diantaranya:

1. Kurang efektif dan efisiennya dan kurang sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Bandung terhadap diadakannya Aplikasi Sibapokting, karena dilakukannya sosialisasi tidak intensif dan tidak berkelanjutan karena hal itu masyarakat di Kabupaten Bandung kurang

mendapatkan informasi tentang keberadaan Aplikasi Sibapokting, Terlihat dari data unduhan yang tertera pada *Google Play Store* jumlah pengguna yang mengunduh aplikasi Sibapokting hanya sekitar 340 akun dan jumlah pengunjung 93 orang sementara itu data penduduk tahun 2023 Masyarakat Kabupaten Bandung tercatat sekitar 116.760 penduduk sehingga tujuan dari pemerintah memberikan informasi yang masif , masih belum tepat sasaran.

2. Daya Saing Pasar Rakyat Masih Rendah dan Sarana dan Prasarana pasar rakyat belum memenuhi standar pasar sehat
3. Masih lemahnya Penguasaan Teknologi yang menyebabkan Daya Saing Produk Industri Menjadi Rendah
4. Kinerja pemeliharaan sistem aplikasi yang dilakukan user aplikasi terkait yang mengelola aplikasi sibapokting baik dalam hal pembaharuan dan menyelesaikan sebuah masalah yang di hasilkan dari aplikasi tersebut.
5. Register Aplikasi Sibapokting tidak efektif dikarenakan Aplikasi hanya dikhususkan hanya untuk Petugas Sibapokting.
6. Aplikasi Sibapokting ini Hanya Ada Layanan Informasi Harga Naik dan Turun Barang Pokok dan Barang Penting dan tidak menyediakan sarana lain.

Hadirnya Aplikasi tersebut masih belum optimal untuk mengubah masyarakat dari pola tradisional berubah menjadi elektronik, hal ini dihindari oleh setiap manusia dikarenakan itu semua butuh proses yang panjang, Pengaruh Globalisasi sekrang ini sudah masuk ke belahan kehidupan masyarakat mulai dari kebutuhan

pokok, pendidikan, pengetahuan, politik pemerintahan dalam meningkatkan kinerja pemerintah pusat maupun daerah, Sasaran dari inovasi daerah tersebut harus diarahkan untuk mencapai sebuah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan lagi kualitas pelayanan publik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Kurniasih, Tatik Fidowaty, dan Poni Sukaesih pada tahun 2013 yang berjudul Tentang “Pengaruh Implementasi Kebijakan *E-Government* terhadap kinerja *E-Government* terhadap kinerja aparatur kota cimahi pada penelitian ini dijelaskan bahwa penerapan *E-Government* Perkembangan teknologi, informasi dan komputer telah mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Kota Cimahi telah memanfaatkan teknologi komputer dalam upaya mewujudkan Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatori *survey*. Implementasi Kebijakan *E-Government* maka semakin meningkat kinerja aparatur Hal tersebut memberikan bukti empiris bahwa semakin baik implementasi kebijakan *E-Government* maka semakin meningkat kinerja aparatur.

Penelitian yang dilakukan oleh, Adibowo Rino (2013) “Implementasi Kebijakan Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Indramayu”, Penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan tentang siak dalam meningkatkan pelayanan publik dapat diwujudkan apabila ukuran dan tujuan kebijakan sumber-sumber kebijakan, ciri-ciri instansi pelaksanaan kebijakan komunikasi antar organisasi sikap para pelaksana kebijakan dan adanya dukungan lingkungan

eksternal, Tujuan Penelitian ini untuk Mengetahui Bagaimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan kebijakan tentang SIAK Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Studi Pustaka, Studi lapangan yaitu Observasi Parsipatif dan Wawancara.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh, Novy Riesa Sellfia at al (2021) Inovasi Pelayanan Publik Berbasis *E-Government* Dalam Aplikasi Sampurasun Purwakarta Penelitian ini menjelaskan bahwa, Era digitalisasi yang sedang berkembang pesat dalam bidang Teknologi, Aplikasi Sampurasun merupakan aplikasi yang dibuat oleh tim dari bidang pariwisata yang di dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu yang semata-mata dalam aplikasi Sampurasun Purwakarta melakukan penilaian dalam kualitas pelayanan publik menggunakan teori dari Lenvinne dalam Hardiansyah , yaitu Responsiveness , *Responsibility*, dan *Accountability* dan teori dalam inovasi pelayanan publik *Harvard JFK School of Government*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh, Nia Karniawati dan Yuni Dwi Indriyani Tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2003 Seri C Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Siup), Siup Mnejabarkan tentang kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dagang untuk memiliki surat izin dagang agar terlindunginya usaha dagang yang dijalankan sudah sesuai dengan tertib, menurut pendapat perindikator yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, Metode yang digunakan dalam penelitian ini digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif data dikumpulkan

melalui studi Pustaka,observasi,dokumentasi,dan wawancara. Hasil dari penelitian ini komunikasi aparatur KPPT Kota Cimahi dengan pelaku Umkm belum berjalan efektif daalam perkembangan Umkm di Kota Cimahi belum tersedia secara maksimal.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh, Syaputra (2021) Tentang “Aplikasi *E-Kelurahan* Untuk Peningkatan Pelayanan Administrasi dalam Mendukung Penerapan E-Government”, Penelitian ini menjelaskan bahwa, Pemanfaatan teknologi tepat guna pada kelurahan akan meningkatkan kualitas peran kelurahan sebagai pusat pemerintahan tingkat terendah yang melayani masyarakat, hal itu menjadi fokus utama pembangunan dari agenda pemerintah. pada penelitian ini dikembangkan aplikasi administrasi pelayanan masyarakat secara elektronik dalam melakukan administrasi dengan kemudahan dan waktu yang efisien.

Salah satu kendala internal instansi pemerintahan di kelurahan adalah masih adanya proses administrasi yang masih manual yang berdampak pada pelayanan terhadap warganya. Ada beberapa kelemahan utama dalam penggunaan aplikasi *Microsoft Office* untuk menulis surat, misalnya tergantung pada kemampuan aparatur desa yang tinggi, yang dapat mengakibatkan perubahan format surat dan mudahnya pencatatan data surat secara lengkap. di sisi lain, Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dari observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan aparat desa menggunakan teknologi masih sangat minim, sehingga mutlak diperlukan penggunaan aplikasi layanan administrasi khusus.

Penerapan aplikasi administrasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masing-masing kota dan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan manajemen yang lebih baik. Manfaat lainnya adalah dapat membantu pencatatan data pengelolaan yang ada sehingga membantu kelurahan untuk lebih memahami potensi kelurahan secara lebih jelas, sehingga masyarakat dapat lebih merasakan pelayanan administrasi.

Beberapa hasil Penelitian sebelumnya telah disebutkan di atas, bahwa Sumber daya yang diperlukan harus berkualitas baik dan terlatih dalam metode pelatihan yang progresif, serta manajemen teknologi informasi, khususnya bidang aplikasi teknologi informasi, semua ini sangat penting. sesuai dengan konsep *e-government*. Oleh karena itu, pengelolaan aplikasi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Dalam implementasi mengenai penggunaan aplikasi berbasis *e-government*, penyampaian informasi yang masif dan efektif sangat penting dalam Program Sibapokting karena masih kurang optimal. Dalam pemaparan hasil penelitian diatas diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan, dalam hal kesamaan dalam penelitian ini adalah tentang implementasi *e-government* Program Sibapokting, dimana dapat dilihat implementasi *e-government* ada yang masih baru. Aplikasi yang digunakan sebagai layanan publik kepada masyarakat dalam program sistem informasi barang pokok dan barang penting (Sibapokting) untuk pengelolaan komoditas harga pasar, dan juga memberikan informasi pengelolaan harga pasar terkini kepada masyarakat luas.

Berdasarkan Pemaparan latar belakang di atas diatas peneliti tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan *E-Government* Melalui Aplikasi Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting (Sibapokting) di Kabupaten Bandung“**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kebijakan *E-Government* Melalui Aplikasi Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting (Sibapokting) di Kabupaten Bandung dilihat dari Ukuran dan Tujuan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi, Karakter organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Lingkungan sosial,ekonomi dan politik?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan data dan informasi terkait implementasi *e-government* dalam pengelolaan informasi harga pasar komoditas melalui Sibapokting di Kabupaten Bandung. Tujuan yang dicapai dengan penulisan penelitian ini antara lain:

1. Untuk Mengetahui tolak ukur, tolak ukur adalah suatu dasar yang dijadikan sebagai ukuran utama untuk melaksanakan setiap Implementasi Kebijakan *E-Government* Melalui Aplikasi Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting (Sibapokting) di Kabupaten Bandung.
2. Untuk Mengevaluasi Sumber daya suatu komponen yang dapat memberikan manfaat pada pelaksanaan agar dapat berjalan sesuai rencana, maka dari pada itu dalam menjalankan suatu program kebijakan peran sumber daya

sangat diperlukan untuk terwujudnya tujuan penggunaan aplikasi Sibapokting dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* Melalui Aplikasi Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting (Sibapokting) di Kabupaten Bandung.

3. Untuk Mengamati Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan merupakan cara yang dilakukan para aparatur pelaksana kebijakan dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* Melalui Aplikasi Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting (Sibapokting) di Kabupaten Bandung.
4. Untuk Menganalisis Karakteristik organisasi pelaksana adalah sikap dari masing-masing dalam setiap pelaksanaan kebijakan dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* Melalui Aplikasi Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting (Sibapokting) di Kabupaten Bandung.
5. Untuk Memahami sikap para pelaksana, sikap pelaksana adalah sikap yang dominan dari aparatur kebijakan dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* Melalui Aplikasi Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting (Sibapokting) di Kabupaten Bandung.
6. Untuk Menentukan Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik adalah kondisi pemerintah yang sangat berpengaruh penting pada berjalannya kebijakan dalam Implementasi Kebijakan *E-Government* Melalui Aplikasi Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting (Sibapokting) di Kabupaten Bandung.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut beberapa kegunaan pada penelitian ini :

a) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tumpuan serta dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan Dalam Bidang Ilmu Pemerintahan, serta melatih diri sebagai pengembangan pikiran secara ilmiah, pemikiran yang rasional dan untuk pengembangan Ilmu Pemerintahan. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang diteliti dari segi teoritis.

b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan mengenai Implementasi Kebijakan *E-Government* Melalui Aplikasi Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting Sibapokting di Kabupaten Bandung.

1. Bagi Peneliti

Semoga hasil dari penelitian bermanfaat bagi peneliti, mengubah pandangan dan menambah wawasan serta pengetahuan dalam

Implementasi Kebijakan *E-Government* melalui Aplikasi, menjadi sebuah pembelajaran tentang perbandingan ilmu yang didapatkan di perkuliahan dengan ilmu yang didapatkan di perkuliahan dengan ilmu yang didapatkan dengan praktik sesungguhnya pada sebuah instansi.

2. Bagi Universitas Komputer Indonesia (Unikom)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan menjadi bahan referensi perpustakaan dan bahan pembelajara bagi mahasiswa yang ingin melakukan pengembangan penelitian.

3. Bagi Ilmu Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan mampu menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan yang akan melaksanakan penelitian di waktu yang akan datang.

4. Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang menjadi objek penelitian diharapkan dengan dilakukan penelitian ini mampu memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait Implementasi Kebijakan *E-Government* Melalui Aplikasi Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting (Sibapokting) di Kabupaten Bandung.

5. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat Kabupaten Bandung tentang

Sistem Informasi Barang Pokok dan Barang Penting (Sibapokting) di  
Kabupaten Bandung.